



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan pelaksanaan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2004 Nomor 4 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

37. Peraturan...

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.997.934.331.830,16
2. Belanja Daerah	Rp.	1.998.780.873.830,16
Surplus/ (Defisit)	Rp	(846.542.000,00)
3. Pembiayaan Daerah	-	
a. Penerimaan	Rp.	10.846.542.000,00
b. Pengeluaran	Rp	10.000.000.000,00
Pembiayaan netto	Rp.	846.542.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	:Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	153.751.999.039,36
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.387.144.598.822,80
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah.	Rp.	457.037.733.968,00

(2)Pendapatan...

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 22.369.750.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 15.587.054.540,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.749.916.351,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 112.045.278.148,36
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/
Bukan Pajak sejumlah Rp. 62.431.207.964,80
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 976.928.484.858,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 347.784.906.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah sejumlah Rp. 70.502.132.000,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 67.309.702.468,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 173.908.433.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 145.317.466.500,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
Sejumlah Rp. 1.099.013.430.654,16
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 899.767.443.176,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 752.212.413.614,16
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 1.183.163.800,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 58.122.360.000,00

e. Belanja...

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	2.080.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	283.915.493.240,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	1.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	35.245.048.750,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	455.280.239.659,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	409.242.154.767,00

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah	Rp.	10.846.542.000,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	10.846.542.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,00
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5...

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan...

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-Perangkat Daerah.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA- Perangkat Daerah.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA- Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan DPA- Perangkat Daerah oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

(11)Pelaksanaan...

- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Operasionalisasi pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 9 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 10
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR:
404.10/2016



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.997.934.331.830,16
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	153.751.999.039,36
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.369.750.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.587.054.540,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.749.916.351,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.045.278.148,36
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.387.144.598.822,80
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.431.207.964,80
1.2.2	Dana Alokasi Umum	976.928.484.858,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	347.784.906.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	457.037.733.968,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	70.502.132.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	67.309.702.468,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	173.908.433.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	145.317.466.500,00
2	BELANJA	1.998.780.873.830,16
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.099.013.430.654,16
2.1.1	Belanja Pegawai	752.212.413.614,16
2.1.3	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00
2.1.4	Belanja Hibah	58.122.360.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.080.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	283.915.493.240,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	899.767.443.176,00
2.2.1	Belanja Pegawai	35.245.048.750,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	455.280.239.659,00
2.2.3	Belanja Modal	409.242.154.767,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(846.542.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.846.542.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.846.542.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	846.542.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	432.574.461.700,00	146.312.591.980,00	578.887.053.680,00
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	432.574.461.700,00	145.387.591.980,00	577.962.053.680,00
2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	925.000.000,00	925.000.000,00
1.02.01	DINAS KESEHATAN	45.825.302.920,00	39.206.044.800,00	89.978.941.490,00	129.184.986.290,00
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	45.825.302.920,00	39.206.044.800,00	89.978.941.490,00	129.184.986.290,00
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DR. H. KOESNADI	70.000.000.000,00	22.436.189.700,00	98.053.000.000,00	120.489.189.700,00
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	70.000.000.000,00	22.436.189.700,00	98.053.000.000,00	120.489.189.700,00
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	128.286.000,00	10.808.380.400,00	307.155.440.995,00	317.963.821.395,00
1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	128.286.000,00	10.808.380.400,00	306.315.440.995,00	317.123.821.395,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	840.000.000,00	840.000.000,00
1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	7.950.282.300,00	2.669.000.000,00	10.619.282.300,00
1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	1.678.000.000,00	1.678.000.000,00
1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	7.950.282.300,00	757.000.000,00	8.707.282.300,00
2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	234.000.000,00	234.000.000,00
1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	1.947.641.800,00	3.099.421.760,00	5.047.063.560,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	1.947.641.800,00	3.099.421.760,00	5.047.063.560,00
1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	4.753.000.100,00	2.800.462.500,00	7.553.462.600,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	4.753.000.100,00	2.800.462.500,00	7.553.462.600,00
1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	2.391.198.600,00	13.425.632.500,00	15.816.831.100,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	2.391.198.600,00	13.425.632.500,00	15.816.831.100,00
1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	2.505.336.300,00	3.200.000.000,00	5.705.336.300,00
1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	2.505.336.300,00	3.200.000.000,00	5.705.336.300,00
2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	8.102.057.000,00	4.061.628.054,00	12.163.685.054,00
2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	8.102.057.000,00	861.934.000,00	8.963.991.000,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.846.542.000,00	10.000.000.000,00	846.542.000,00	
4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	10.846.542.000,00	10.000.000.000,00	846.542.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

BUPATI BONDOWOSO



AMIN SAID HUSNI



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
 Organisasi : 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.553.569.100,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.837.660.100,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.837.660.100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.715.909.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	572.877.820,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	145.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	5.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	22.193.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.193.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	10.201.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.201.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	34.162.820,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.162.820,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	10.860.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.860.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05.4.05.01.01.14.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.05.4.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.000.000,00	
4.05.4.05.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.05.4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	18.710.000,00	
4.05.4.05.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.710.000,00	
4.05.4.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	256.300.000,00	
4.05.4.05.01.01.18.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
4.05.4.05.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.700.000,00	
4.05.4.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	9.300.000,00	
4.05.4.05.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
4.05.4.05.01.01.20	Penyediaan Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat	15.000.000,00	
4.05.4.05.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	630.072.030,00	
4.05.4.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	164.355.830,00	
4.05.4.05.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	164.355.830,00	
4.05.4.05.01.02.13	Pengadaan Sarana Komunikasi	58.550.000,00	
4.05.4.05.01.02.13.5.2.1	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
4.05.4.05.01.02.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	
4.05.4.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.215.600,00	
4.05.4.05.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.215.600,00	
4.05.4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	97.950.600,00	
4.05.4.05.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.950.600,00	
4.05.4.05.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	280.000.000,00	
4.05.4.05.01.02.42.5.2.3	Belanja Modal	280.000.000,00	
4.05.4.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.000.000,00	
4.05.4.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.500.000,00	
4.05.4.05.01.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	981.500,00	
4.05.4.05.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	518.500,00	
4.05.4.05.01.06.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan	1.500.000,00	
4.05.4.05.01.06.05.5.2.1	Belanja Pegawai	957.200,00	
4.05.4.05.01.06.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	542.800,00	
4.05.4.05.01.28	Program Pendidikan Kedinasan	337.408.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 30 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.553.569.100,00)	

BUPATI BONDOWOSO



AMIN SAID HUSNI



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	19.083.862.500,00	275.086.543.028,00	376.344.747.897,00	670.515.154.225,00
1.01	Pendidikan	2.939.411.000,00	72.682.297.100,00	70.017.744.280,00	145.639.452.380,00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.925.836.000,00	72.456.011.700,00	70.005.744.280,00	145.387.591.980,00
1.01 . 1.01.01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	879.300.000,00	1.018.180.000,00	0,00	1.897.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	597.470.000,00	0,00	597.470.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	157.010.000,00	0,00	157.010.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	34.050.000,00	0,00	34.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	61.600.000,00	0,00	61.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.800.000,00	141.000.000,00	0,00	148.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	871.500.000,00	0,00	0,00	871.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	4.500.000,00	243.860.000,00	1.989.008.000,00	2.237.368.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	1.500.000,00	0,00	548.500.000,00	550.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	802.790.000,00	802.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	71.860.000,00	0,00	71.860.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	3.000.000,00	0,00	637.718.000,00	640.718.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	1.930.000,00	1.070.000,00	0,00	3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	965.000,00	535.000,00	0,00	1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05	Penyusunan Pelaporan Keuangan	965.000,00	535.000,00	0,00	1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>	279.675.000,00	6.837.650.000,00	711.220.000,00	7.828.545.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01	Pembangunan gedung sekolah	0,00	0,00	199.100.000,00	199.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	300.000,00	398.700.000,00	0,00	399.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.000.000,00	0,00	447.250.000,00	448.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	217.300.000,00	5.877.050.000,00	64.870.000,00	6.159.220.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	3.675.000,00	484.575.000,00	0,00	488.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 17	Penyusunan Formasi Pegawai dan Bezitting	11.474.000,00	20.119.800,00	0,00	31.593.800,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21	Penataan Sistem Administrasi Penerbitan (Karis/Karsu/Karpeg dan Taspen)	0,00	15.826.000,00	0,00	15.826.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 24	Seleksi dan Pengusulan Tanda Kehormatan PNS	3.700.000,00	18.877.500,00	0,00	22.577.500,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 25	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	4.850.000,00	197.653.000,00	0,00	202.503.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 30	Penegakan Disiplin PNS	125.900.000,00	27.090.000,00	0,00	152.990.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 31	Penerimaan Calon Praja IPDN	2.200.000,00	45.050.000,00	0,00	47.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 37	Penerbitan Kartu Tanda Pengenal PNS	4.300.000,00	7.509.000,00	0,00	11.809.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 39	Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian	108.700.000,00	23.425.000,00	0,00	132.125.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 41	Penilaian Kinerja dan Assesment Bagi Pejabat Struktural	33.125.000,00	237.860.000,00	0,00	270.985.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 42	Penilaian Kinerja Bagi Jabatan Fungsional	121.500.000,00	74.985.000,00	0,00	196.485.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 45	Penataan Sistem Administrasi Penerbitan SK Pensiun	0,00	43.277.900,00	0,00	43.277.900,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 47	Pembekalan Bagi PNS Menjelang Purna Tugas	15.750.000,00	81.877.000,00	0,00	97.627.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 49	Seleksi dan Pemutasian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	55.500.000,00	173.450.000,00	0,00	228.950.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 50	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja PNS	44.600.000,00	15.350.000,00	0,00	59.950.000,00
JUMLAH		35.245.048.750,00	455.280.239.659,00	409.242.154.767,00	899.767.443.176,00

BUPATI BONDOWOSO



AMIN SAID HUSNI



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
01	PELAYANAN UMUM	172.580.042.714,16	346.801.017.040,00	10.206.531.500,00	85.633.725.544,00	9.087.172.450,00	624.308.489.248,16
01 2 03	Pangan	904.141.900,00	0,00	735.450.000,00	19.319.048.000,00	138.450.000,00	21.097.089.900,00
01 2 10	Komunikasi dan Informatika	3.942.259.900,00	0,00	330.812.500,00	4.932.820.900,00	41.202.000,00	9.247.095.300,00
01 2 18	Kearsipan	0,00	0,00	17.250.000,00	241.221.000,00	0,00	258.471.000,00
01 4 01	Administrasi Pemerintahan	92.979.321.050,00	0,00	1.361.194.500,00	34.878.619.844,00	6.436.091.900,00	135.655.227.294,00
01 4 02	Pengawasan	2.620.804.900,00	0,00	1.216.464.000,00	3.470.115.100,00	119.100.000,00	7.426.484.000,00
01 4 03	Perencanaan	2.366.988.900,00	0,00	2.981.063.000,00	7.228.853.750,00	305.999.900,00	12.882.905.550,00
01 4 04	Keuangan	66.928.865.964,16	346.801.017.040,00	2.542.905.000,00	12.354.049.100,00	1.560.910.000,00	430.187.647.104,16
01 4 05	Kepegawaian	2.837.660.100,00	0,00	1.021.392.500,00	3.208.997.850,00	485.518.650,00	7.553.569.100,00
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	9.091.940.500,00	0,00	1.832.184.000,00	7.739.268.260,00	10.865.701.000,00	29.528.993.760,00
03 1 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	9.091.940.500,00	0,00	1.832.184.000,00	7.739.268.260,00	10.865.701.000,00	29.528.993.760,00
04	EKONOMI	27.223.728.400,00	0,00	4.387.359.750,00	52.502.934.689,00	12.317.870.420,00	96.431.393.259,00
04 2 01	Tenaga Kerja	0,00	0,00	219.900.000,00	3.574.623.600,00	921.199.500,00	4.715.723.100,00
04 2 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.123.335.900,00	0,00	1.315.306.750,00	8.492.767.175,00	556.476.400,00	12.487.886.225,00
04 2 09	Perhubungan	0,00	0,00	1.083.097.000,00	4.786.808.000,00	1.406.819.520,00	7.276.724.520,00
04 2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.326.966.000,00	0,00	256.575.000,00	8.297.700.000,00	216.850.000,00	14.098.091.000,00
04 2 12	Penanaman Modal	3.954.195.500,00	0,00	472.528.000,00	1.220.872.000,00	619.100.000,00	6.266.695.500,00
04 3 01	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	69.400.000,00	2.104.650.000,00	2.500.000,00	2.176.550.000,00
04 3 03	Pertanian	15.818.731.000,00	0,00	513.703.000,00	13.638.978.900,00	1.508.900.000,00	31.480.312.900,00
04 3 05	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	37.200.000,00	850.400.000,00	0,00	887.600.000,00
04 3 06	Perdagangan	0,00	0,00	203.900.000,00	2.543.456.014,00	3.357.225.000,00	6.104.581.014,00
04 3 07	Perindustrian	0,00	0,00	211.050.000,00	6.862.264.000,00	3.728.800.000,00	10.802.114.000,00
04 3 08	Transmigrasi	0,00	0,00	4.700.000,00	130.415.000,00	0,00	135.115.000,00
05	LINGKUNGAN HIDUP	11.222.784.000,00	0,00	377.825.000,00	28.609.262.544,00	6.535.416.000,00	46.745.287.544,00
05 2 05	Lingkungan Hidup	11.222.784.000,00	0,00	377.825.000,00	28.609.262.544,00	6.535.416.000,00	46.745.287.544,00
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	18.758.662.700,00	0,00	1.359.829.000,00	61.832.792.800,00	245.967.819.195,00	327.919.103.695,00

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
06	1 03	10.808.380.400,00	0,00	1.319.579.000,00	61.479.042.800,00	245.604.819.195,00	319.211.821.395,00
06	1 04	7.950.282.300,00	0,00	40.250.000,00	353.750.000,00	363.000.000,00	8.707.282.300,00
07	KESEHATAN	61.642.234.500,00	0,00	12.425.795.000,00	128.738.157.122,00	50.107.683.422,00	252.913.870.044,00
07	1 02	61.642.234.500,00	0,00	12.306.095.000,00	126.640.163.068,00	49.125.683.422,00	249.714.175.990,00
07	2 08	0,00	0,00	119.700.000,00	2.097.994.054,00	982.000.000,00	3.199.694.054,00
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	5.257.699.300,00	0,00	122.508.000,00	5.082.392.000,00	3.002.750.000,00	13.465.349.300,00
08	2 16	0,00	0,00	26.500.000,00	2.113.450.000,00	582.850.000,00	2.722.800.000,00
08	3 02	5.257.699.300,00	0,00	96.008.000,00	2.968.942.000,00	2.419.900.000,00	10.742.549.300,00
10	PENDIDIKAN	433.873.811.700,00	0,00	3.087.527.000,00	75.182.761.100,00	70.387.292.280,00	582.531.392.080,00
10	1 01	432.574.461.700,00	0,00	2.939.411.000,00	72.682.297.100,00	70.017.744.280,00	578.213.914.080,00
10	2 13	0,00	0,00	15.050.000,00	1.282.500.000,00	0,00	1.297.550.000,00
10	2 17	1.299.350.000,00	0,00	133.066.000,00	1.217.964.000,00	369.548.000,00	3.019.928.000,00
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	12.562.109.800,00	0,00	1.445.489.500,00	9.958.915.600,00	970.450.000,00	24.936.994.900,00
11	1 06	2.505.336.300,00	0,00	646.343.500,00	6.192.022.600,00	367.800.000,00	9.711.502.400,00
11	2 02	8.102.057.000,00	0,00	178.090.000,00	648.644.000,00	35.200.000,00	8.963.991.000,00
11	2 06	1.954.716.500,00	0,00	621.056.000,00	3.118.279.000,00	567.450.000,00	6.261.501.500,00
		752.212.413.614,16	346.801.017.040,00	35.245.048.750,00	455.280.239.659,00	409.242.154.767,00	1.998.780.873.830,16

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	II	III	IV	V	TENAGA Fungsional	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	1	0	0	0	0	2	3
Golongan IV/c	24	0	0	0	0	27	51
Golongan IV/b	4	60	4	0	0	1383	1451
Golongan IV/a	1	81	41	0	3	1188	1314
JUMLAH GOLONGAN IV	30	141	45	0	3	2600	2819
Golongan III/d	0	23	266	0	27	544	860
Golongan III/c	0	1	228	0	79	554	862
Golongan III/b	0	0	66	0	325	757	1148
Golongan III/a	0	0	11	0	423	844	1278
JUMLAH GOLONGAN III	0	24	571	0	854	2699	4148
Golongan II/d	0	0	0	0	185	178	363
Golongan II/c	0	0	0	0	902	175	1077
Golongan II/b	0	0	0	0	807	93	900
Golongan II/a	0	0	0	0	386	3	389
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	2280	449	2729
Golongan I/d	0	0	0	0	79	0	79
Golongan I/c	0	0	0	0	254	0	254
Golongan I/b	0	0	0	0	41	0	41
Golongan I/a	0	0	0	0	1	0	1
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	375	0	375
TOTAL	30	165	616	0	3512	5748	10071

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun 2015	Perkiraan penambahan tahun 2016	Perkiraan pengurangan tahun 2016	Perkiraan saldo pada akhir tahun 2016
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tanah	311,093,641,924.00	3,109,665,520.00	0.00	314,203,307,444.00
	Tanah	311,093,641,924.00	3,109,665,520.00	0.00	314,203,307,444.00
2	Peralatan dan Mesin	346,729,110,825.98	30,608,314,160.50	0.00	377,337,424,986.48
	Alat-alat Berat	6,621,380,350.00	453,426,520.00	0.00	7,074,806,870.00
	Alat-alat Angkutan	77,553,637,756.00	7,932,112,230.00	0.00	85,485,749,986.00
	Alat Bengkel	4,835,305,371.00	89,900,000.00	0.00	4,925,205,371.00
	Alat Pertanian dan Peternakan	5,335,923,683.50	311,086,000.00	0.00	5,647,009,683.50
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	97,971,700,977.46	9,012,777,724.00	0.00	106,984,478,701.46
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	12,479,177,164.80	1,290,368,001.00	0.00	13,769,545,165.80
	Alat Ukur	914,241,196.00	11,820,000.00	0.00	926,061,196.00
	Alat-alat Kedokteran	88,026,078,814.26	8,632,642,885.50	0.00	96,658,721,699.76
	Alat Laboratorium	52,399,313,384.96	2,792,635,800.00	0.00	55,191,949,184.96
	Alat Keamanan	592,352,128.00	81,545,000.00	0.00	673,897,128.00
3	Gedung dan Bangunan	466,338,621,522.41	67,279,464,597.00	0.00	533,618,086,119.41
	Bangunan Gedung	459,550,856,672.41	66,498,921,597.00	0.00	526,049,778,269.41
	Bangunan Monumen	6,787,764,850.00	780,543,000.00	0.00	7,568,307,850.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	702,999,445,264.54	200,944,426,950.00	0.00	903,943,872,214.54
	Jalan dan Jembatan	271,794,540,453.24	70,300,140,400.00	0.00	342,094,680,853.24
	Bangunan Air (Irigasi)	385,214,458,208.30	125,559,513,000.00	0.00	510,773,971,208.30
	Instalasi	9,377,018,740.00	67,043,000.00	0.00	9,444,061,740.00
	Jaringan	36,613,427,863.00	5,017,730,550.00	0.00	41,631,158,413.00
5	Aset Tetap Lainnya	21,092,004,521.46	359,805,400.00	0.00	21,451,809,921.46
	Buku dan Perpustakaan	18,762,262,582.46	343,105,400.00	0.00	19,105,367,982.46
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1,609,053,264.00	16,700,000.00	0.00	1,625,753,264.00
	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	720,688,675.00	0.00	0.00	720,688,675.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	528,603,012.00	0.00	0.00	528,603,012.00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	528,603,012.00	0.00	0.00	528,603,012.00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(399,996,918,850.54)	0.00	0.00	(399,996,918,850.54)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(399,996,918,850.54)	0.00	0.00	(399,996,918,850.54)
	Jumlah	1,448,784,508,219.85	302,301,676,627.50	0.00	1,751,086,184,847.35

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun 2015	Perkiraan Penambahan Tahun 2016	Perkiraan Pengurangan Tahun 2016	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2016
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Daerah	2,578,289,009.00	0.00	0.00	2,578,289,009.00
3.	Kemitraan dengan pihak ketiga	151,408,140.00	0.00	0.00	151,408,140.00
4.	Aset tak berwujud	2,427,167,800.00	897,101,500.00	0.00	3,324,269,300.00
	Dinas Pendidikan	0.00	458,640,000.00	0.00	458,640,000.00
	Software	0.00	458,640,000.00	0.00	458,640,000.00
	Dinas Kesehatan	99,500,000.00	500,000.00	0.00	100,000,000.00
	Software Anti Virus	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aplikasi Persediaan Obat Berbasis Web	99,500,000.00	0.00	0.00	99,500,000.00
	Software	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	BLUD RSUD dr. H. Koesnadi	0.00	0.00	0.00	0.00
	Software SIM Rumah Sakit	0.00	0.00	0.00	0.00
	Maintenance Software Apotik dan Gudang Farmasi	0.00	0.00	0.00	0.00
	Software AntiVirus Kaspersky	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recovery SIM RSU	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Website	0.00	0.00	0.00	0.00
	Updating Website Kebinamargaan dan Keciptakaryaan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dinas Pengairan	185,658,000.00	0.00	0.00	185,658,000.00
	Aplikasi Pemetaan Aset Irigasi Kabupaten	185,658,000.00	0.00	0.00	185,658,000.00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21,092,500.00	0.00	0.00	21,092,500.00
	Software SIMPEDAL	21,092,500.00	0.00	0.00	21,092,500.00

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun 2015	Perkiraan Penambahan Tahun 2016	Perkiraan Pengurangan Tahun 2016	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2016
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
	Sistem Aplikasi Update Data Masyarakat Miskin	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	298,750,000.00	0.00	0.00	298,750,000.00
	Software Simduk	0.00	0.00	0.00	0.00
	Software Update SIAK-AFIS	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
	Software SIAK Desa/Kelurahan	199,300,000.00	0.00	0.00	199,300,000.00
	Software Sistem Aplikasi Arsip Elektronik	55,950,000.00	0.00	0.00	55,950,000.00
	Website	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
	Dinas Tenaga Kerja	0.00	0.00	0.00	0.00
	Website	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bagian Hubungan Masyarakat & Pengolahan Data Elektronik	0.00	0.00	0.00	0.00
	Updating Desain Website	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bagian Hukum	14,080,000.00	0.00	0.00	14,080,000.00
	Software	14,080,000.00	0.00	0.00	14,080,000.00
	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	939,601,000.00	0.00	0.00	939,601,000.00
	Software Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00
	Software Windows Server	10,650,000.00	0.00	0.00	10,650,000.00
	Antivirus	0.00	0.00	0.00	0.00
	Software PBB	297,865,000.00	0.00	0.00	297,865,000.00
	Customisasi Software Simpada	49,700,000.00	0.00	0.00	49,700,000.00
	Software Sismiop	49,636,000.00	0.00	0.00	49,636,000.00
	Software Simd@k	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00
	Aplikasi Penyetoran PBB P2	190,300,000.00	0.00	0.00	190,300,000.00
	Software Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	104,500,000.00	0.00	0.00	104,500,000.00
	Software Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan PBB dan BPHTB (Mobile Sismop)	98,450,000.00	0.00	0.00	98,450,000.00
	Badan Kepegawaian Daerah	262,109,300.00	80,300,000.00	0.00	262,109,300.00
	Software SIMPEG	70,609,500.00	0.00	0.00	70,609,500.00
	Software Corel Draw X3	0.00	0.00	0.00	0.00
	Website	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
	Software Mesin Absensi	59,199,800.00	0.00	0.00	59,199,800.00
	Software Simpeg Webbase	84,737,500.00	0.00	0.00	84,737,500.00
	Software Kenaikan Pangkat	43,662,500.00	0.00	0.00	43,662,500.00

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun 2015	Perkiraan Penambahan Tahun 2016	Perkiraan Pengurangan Tahun 2016	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2016
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
	Software	0.00	80,300,000.00	0.00	80,300,000.00
	Kantor Perpustakaan dan Arsip	49,143,000.00	0.00	0.00	49,143,000.00
	Software Otomasi Perpustakaan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Software Kearsipan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Software Kearsipan	49,143,000.00	0.00	0.00	49,143,000.00
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	103,955,000.00	197,855,500.00	0.00	301,810,500.00
	Website	0.00	0.00	0.00	0.00
	Software Sistem Informasi Perijinan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Software Aplikasi Sistem Informasi Perijinan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Software Aplikasi Sistem Informasi Perijinan	103,955,000.00	0.00	0.00	103,955,000.00
	Software pada Kegiatan Pengembangan Sarana Informasi Perijinan Kantor	0.00	197,855,500.00	0.00	197,855,500.00
	Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga & Perhubungan	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00
	Website Pariwisata	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00
	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	403,779,000.00	0.00	0.00	403,779,000.00
	Software dan Updating Sistem Manajemen UMKM	183,000,000.00	0.00	0.00	183,000,000.00
	Software Database Koperasi	50,229,000.00	0.00	0.00	50,229,000.00
	Sistem Informasi Manajemen	170,550,000.00	0.00	0.00	170,550,000.00
	Bagian Pemerintahan	0.00	44,719,000.00	0.00	44,719,000.00
	Website	0.00	44,719,000.00	0.00	44,719,000.00
	Inspektorat	0.00	115,087,000.00	0.00	115,087,000.00
	Website	0.00	115,087,000.00	0.00	115,087,000.00
5.	Amortisasi aset tidak berwujud	(383,735,805.00)	0.00	0.00	(383,735,805.00)
6.	Aset lain-lain	45,219,538,060.92	0.00	0.00	45,219,538,060.92
	Aset yang dihentikan penggunaannya	31,308,631,138.03	0.00	0.00	31,308,631,138.03
	Tanah	133,551,840.00	0.00	0.00	133,551,840.00
	Alat-alat Angkutan	172,329,000.00	0.00	0.00	172,329,000.00
	Alat Bengkel	15,967,500.00	0.00	0.00	15,967,500.00
	Alat Pertanian dan Peternakan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	11,296,330,560.96	0.00	0.00	11,296,330,560.96
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	463,110,006.00	0.00	0.00	463,110,006.00
	Alat-alat Kedokteran	4,939,884,161.07	0.00	0.00	4,939,884,161.07
	Alat Laboratorium	2,341,432,271.00	0.00	0.00	2,341,432,271.00
	Bangunan Gedung	122,054,400.00	0.00	0.00	122,054,400.00

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai Dengan Tahun 2015	Perkiraan Penambahan Tahun 2016	Perkiraan Pengurangan Tahun 2016	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2016
	- Bagi Hasil Parkir	2014.2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Piutang Sewa Prodi D-III Keperawatan Unibo	2014.2015	18,750,000.00	0.00	0.00	18,750,000.00
	- Piutang Sewa ATM BNI	2014.2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Piutang Bantuan Keuangan Parpol	2014.2015	96,640,604.00	0.00	0.00	96,640,604.00
	- Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	2012 s.d 2015	228,765,000.00	0.00	0.00	228,765,000.00
	- Piutang Denda Keterlambatan Proyek	2011	33,990,040.00	0.00	0.00	33,990,040.00
	- Kredit Sepeda Motor Pegawai	November 2003	2,409,417.96	0.00	0.00	2,409,417.96
11	- Piutang Yang Timbul Dari Perjanjian/Perikatan		9,842,052,388.86	0.00	0.00	9,842,052,388.86
	- Kredit Sapi Kereman	2000 s/d 2003	1,295,253,457.00	0.00	0.00	1,295,253,457.00
	- Kredit Usaha Kecil Menengah (Feeder Point)	2002 s/d 2007	2,366,384,118.92	0.00	0.00	2,366,384,118.92
	- Kredit Pembelian Gabah Petani	2002 s/d 2007	1,389,129,336.94	0.00	0.00	1,389,129,336.94
	- Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Februari 2003 s/d Agustus 2008	4,766,776,226.00	0.00	0.00	4,766,776,226.00
	- Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan	March 2005	18,109,250.00	0.00	0.00	18,109,250.00
	- Kredit Bantuan TKI	July 2007	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00
12	Penyisihan Piutang		(14,705,600,426.02)	0.00	0.00	(14,705,600,426.02)
	- Piutang Pajak		(3,738,501,576.60)	0.00	0.00	(3,738,501,576.60)
	- Pajak Reklame	2012 s.d 2015	(175,586,395.10)	0.00	0.00	(175,586,395.10)
	- Pajak Penerangan Jalan	1998 s/d 2010	(1,101,408,541.20)	0.00	0.00	(1,101,408,541.20)
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2014.2015	(1,170,378.00)	0.00	0.00	(1,170,378.00)
	- Pajak Hotel dan Restoran	2013,2014,2015	(1,853,904.00)	0.00	0.00	(1,853,904.00)
	- Pajak Hiburan	2013,2014,2015	(356,300.00)	0.00	0.00	(356,300.00)
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2014.2015	(2,396,948,719.00)	0.00	0.00	(2,396,948,719.00)
	- Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	2014.2015	(61,177,339.30)	0.00	0.00	(61,177,339.30)
	- Piutang Retribusi		(926,296,079.80)	0.00	0.00	(926,296,079.80)
	- Retribusi Sewa Tanah Trotoar	2010	(1,688,400.00)	0.00	0.00	(1,688,400.00)
	- Retribusi Sewa Kios Terminal	2012 s.d 2015	(6,323,000.00)	0.00	0.00	(6,323,000.00)

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun 2015	Perkiraan Penambahan Tahun 2016	Perkiraan Pengurangan Tahun 2016	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2016
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
	Jalan dan Jembatan	1,621,350,508.00	0.00	0.00	1,621,350,508.00
	Bangunan Air (Irigasi)	3,807,087,112.00	0.00	0.00	3,807,087,112.00
	Software	6,395,533,779.00	0.00	0.00	6,395,533,779.00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yg dihentikan Penggunaannya	(6,160,822,277.11)	0.00	0.00	(6,160,822,277.11)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6,160,822,277.11)	0.00	0.00	(6,160,822,277.11)
	Aset yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	20,071,729,200.00	0.00	0.00	20,071,729,200.00
	Dinas Bina Marga	20,071,729,200.00	0.00	0.00	20,071,729,200.00
	Realisasi belanja modal jalan tahun anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang diusulkan untuk dihapus karena jalan tersebut merupakan jalan desa dan jalan lingkungan.	13,907,419,500.00	0.00	0.00	13,907,419,500.00
	Realisasi belanja modal Bangunan Air (Irigasi) tahun anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang status tanahnya adalah tanah milik masyarakat dan pengelolaannya telah diserahkan kepada Himpunan Pengguna Air Minum (HIPAM) setempat.	5,965,813,700.00	0.00	0.00	5,965,813,700.00
	Realisasi Kegiatan rehabilitasi makam Raden Bagus Asra Kertonegoro (Kironnggo) sebagai hibah untuk pemeliharaan bangunan bersejarah.	198,496,000.00	0.00	0.00	198,496,000.00
	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reklasifikasi dari aset tetap instalasi berupa jaringan listrik perdesaan di Dsn. Sbr. Canting Kecamatan Wringin dan Dsn. Laok Kebun Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reklasifikasi dari aset tetap instalasi berupa PLTS di Dusun Morina Desa Cangkring Kecamatan Prajekan.	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	49,992,667,204.92	897,101,500.00	0.00	50,889,768,704.92

BUPATI BONDOWOSO


AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kode Kegiatan	Judul kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2015 (Rp)	Jumlah Anggaran TAHUN 2016		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2016 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2017	
			APBD INDUK TA 2015	PERUBAHAN APBD TA 2015		APBD INDUK TA 2016	PERUBAHAN APBD TA 2016		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NIHIL										
Jumlah			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BUPATI BONDOWOSO


 AMIN SAID HUSNI



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kode	Judul kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN 2016		Jumlah Realisasi s.d akhir TA 2016	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2017	
			APBD TA 2016	PERUBAHAN APBD TA 2016		APBD	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NIHIL

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dana Pilkada 2018	Perda No.2 Tahun 2016	20,000,000,000.00	0.00	10,000,000,000.00	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Jumlah			20,000,000,000.00					

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga Pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				NIHIL							
Jumlah											

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI